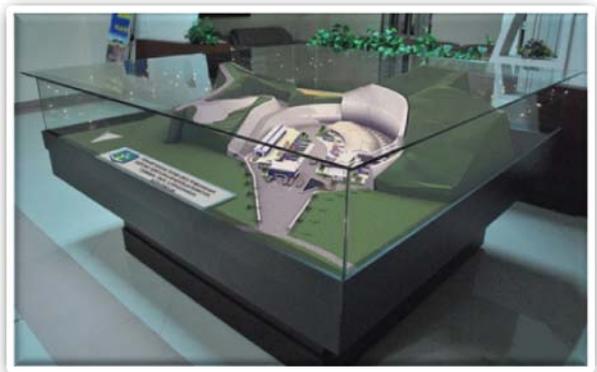




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024



**PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Sebagai pelaksana dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) baik di pusat maupun di daerah berkewajiban membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan sebagai evaluasi terhadap realisasi program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam tahun berjalan, selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga dimaksudkan sebagai bahan pertanggung jawaban instansi instansi pemerintah kepada publik yang secara tidak langsung berpartisipasi mengadakan pengawasan secara optimal.

Atas hal tersebut diatas, maka Dinas Perhubungan Kota Sibolga pada awal tahun anggaran 2025 ini, membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bahan pertanggung jawaban kepada publik atas tingkat kinerja yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2024 yang lalu.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Sibolga, untuk menjadi bahan evaluasi dan informasi kepada publik secara keseluruhan terhadap program serta kegiatan yang sudah dilaksanakan berikut permasalahannya, semoga bermanfaat bagi kemajuan daerah Kota Sibolga.

Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan dari semua pihak, demi penyempurnaan penyusunan laporan inidi tahun- tahun mendatang.

Sibolga, Februari 2025

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGABN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amf', is centered on a light gray rectangular background.

AGUS MANDOHAR SITOMPUL, SE
Penata Tk.I
NIP. 19820810 201101 1 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pengertian Laporan Kinerja.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan Pelaporan Kinerja	2
1.3.1Aspek Akuntabilitas Kinerja.....	3
1.3.2Aspek Manajemen Kinerja	3
1.4 Penjelasan Umum Organisasi.....	3
1.4.1Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi Organisasi..	3
1.4.2 Struktur Organisasi.....	5
1.5 Isu – Isu Organisasi	6
1.6 Anggaran Tahun 2024	7
1.7 dasar Hukum	7
1.8 Sistematika Laporan Kinerja	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis.....	10
2.1.1Visi	10
2.1.2Misi	10
2.2 Rencana Kerja Tahun 2024.....	16
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	17
BAB III AKUNTABILITA SKINERJA	23
3.1 Capain Kinerja Organisasi	23
3.1.1 Membandingkan natar Target dan Realisasi Tahun Pelaporan.....	25
3.1.2 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu Dan beberapa tahun terakhir	26
3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan	

tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi Organisasi.....	28
3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan standar nasional (Jika ada)	30
3.1.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	31
3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia	34
3.1.7 Analisa Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	34
3.2 Realisasi Anggaran	43
BAB IV PENUTUP	45
Lampiran - lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Anggaran Dinas Perhubungan Kota Sibolga Tahun 2024.....	7
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis.....	12
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan ..	14
Tabel 2.3	Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024	16
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Sibolga Tahun 2024	18
Tabel 2.5	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2024	19
Tabel 3.2	Capaian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024	25
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024	26
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024	28
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten Kota	30
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	31
Tabel 3.7	Perbandingan Pencapaian Kinerja, Anggaran dan Sasaran	34
Tabel 3.8	Analisi Keberhasilan dan Kegagalan Prpgram dan Kegiatan	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran Dinas perhubungan Kota Sibolga Tahun 2023	7
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis ..	11
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Sibolga	14
Tabel 2.3 Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Sibolga.....	16
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023...	17
Tabel 2.5 Program, Keiatan dan Sub Kegiatan Perubahan	18
Tabel 3.2 Capaian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023..	23
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Sibolga Tahun 2023	25
Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2023	27
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten Kota	28
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	29
Tabel 3.7 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar Bagan Struktur	6
-----------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan peraturan daerah Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Sibolga Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut di dasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Perhubungan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LkjIP).

Penyusunan LkjIP Dinas Perhubungan Kota Sibolga Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbakan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Pengertian Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Maksud dan Tujuan Pelaporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai dua fungsi utama. Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi instansi di lingkungan pemerintah Kota Sibolga untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang secara berkesinambungan.

Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Sibolga Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1.3.1 Aspek Akuntabilitas Kinerja

Bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan laporan kinerja sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kota Sibolga atas capaian kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang berhasil diperoleh selama tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada tujuan dan sasaran strategi yang telah dicapai sampai dengan tahun 2024.

1.3.2 Aspek Manajemen Kinerja

Bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Dinas Perhubungan Kota Sibolga bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang sehingga dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya serta meningkatkan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Sibolga secara berkelanjutan.

1.4 Penjelasa Umum Organisasi

1.4.1 Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas – Dinas. Dinas Perhubungan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Wali kota dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kota Sibolga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan di bidang perhubungan
- Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan
- Pelaksanaan administrasi dinas
- Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsinya.

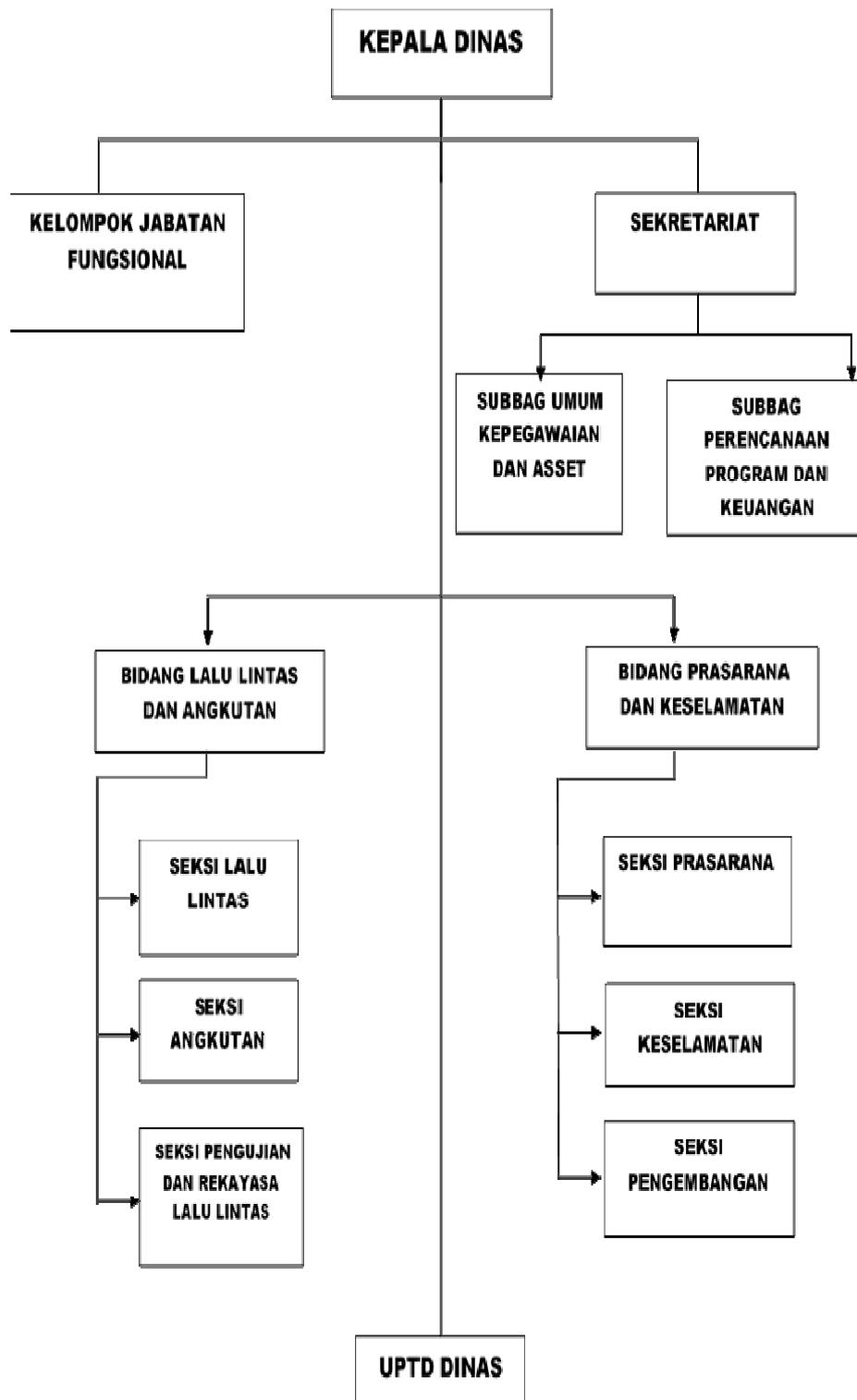
- Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsinya.

Adapun kedudukan dan susunan organisasi Dinas Perhubungan adalah :

1. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan.
2. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Dinas Perhubungan, terdiri dari :
 1. Kepala Dinas.
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Subbagian Umum Kepegawaian dan Perlengkapan.
 - b. Subbagian Perencanaan, Program dan Keuangan
 3. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi:
 - a. Kepala Seksi Lalu Lintas ;
 - b. Kepala Seksi Angkutan;
 - c. Kepala Seksi Pengujian dan Rekayasa Lalu Lintas.
 4. Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan, membawahi:
 - a. Kepala Seksi Pengembangan;
 - b. Kepala Seksi Keselamatan; dan
 - c. Kepala Seksi Prasarana.
 5. -Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), terdiri dari :
 - a. UPT. Perpajakan
 - b. UPT. Pelabuhan Penyeberangan Sibolga
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan. Berikut ini bagan struktur organisasi pada Dinas Perhubungan Kota Sibolga.

1.4.2. Struktur Organisasi.



1.5 Isu – Isu Strategis

Ada beberapa permasalahan utama yang menjadi isu – isu strategis (*strategic issue*) berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Secara umum isu – isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Sibolga sesuai dengan bidang uruasannya adalah sebagai berikut

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi serta penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Secara umum permasalahan terkait transportasi di Kota Sibolga adalah belum optimalnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran transportasi di Kota Sibolga masalah tersebut disebabkan :

1. Masih rendahnya wawasan, disiplin serta pemahaman masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas.
2. Pertumbuhan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan yang tersedia.
3. Ketiadaan Gedung Pengujian Bermotor (PKB) untuk melaksanakan uji KIR bagi kendaraan angkutan penumpang/barang. Hal ini mengakibatkan kendaraan melakukan uji KIR ke daerah lain.
4. Masih adanya beberapa pemilik usaha yang memakai sebagian badan jalan yang bukan untuk peruntukannya.
5. Tata cara pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum secara Tunai dan Non Tunai.
6. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia di Dinas Perhubungan Kota Sibolga yang memiliki latar belakang pengetahuan tentang transportasi (**Penguji Kendaraan Bermotor, Penyidik**)

1.6 Anggaran Tahun 2024

Pada bagian ini menjelaskan rincian anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Sibolga di Tahun 2024.

Tabel.1.1 Anggaran Dinas Perhubungan Kota Sibolga Tahun 2024

Sumber	Jenis Belanja/ Program	Anggaran (Rp)
APBD	Pendapatan	2.768.412.310
	Belanja Daerah	9.156.582.542
	Belanja Operasi	8.881.153.592
	Belanja Modal	275.428.950
	I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	7.742.054.642
	II. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.237.709.100
	III. Program Pelayanan Pelayaran	176.818.800

1.7 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Sibolga Tahun 2024 ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Sibolga No. 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sibolga Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Serta Tugas Dan Fungsi Dinas - Dinas Daerah Kota Sibolga.
10. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah Kota Sibolga.

1.8 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perhubungan Kota Sibolga tahun 2024 menggunakan sistematika penulisan yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas 4 (empat) Bab dengan dukungan data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabulasi, dengan uraian umum masing- masing adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan dan menjelaskan hal – hal yang bersifat umum tentang Latar Belakang, penjelasan umum Struktur Organisasi, Dasara Hukum Penyusuna, serta uraian menyangkut sistematika penulisan dan penyajian laporan yang digunakan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bagian ini menguraiaikan komponen perencanaan strategis yang disajikan sebagai acuan untuk penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja sebagaimana termaktub dalam perjanjian kierja Pimpinan SKPD dengan Walikota Sibolga. Pada bagian ini diuraikan rencana strategis, rencana kerja Tahun 2024, metode pengukuran/ manual indikator kinerja, serta perencana anggaran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini dijelaskan mengenai capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Sibolga serta realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Pada bagain ini dikemukakan kesimpulan dari pelaksanaan kinerja dan saran kedepannya dalam pencapaian kinerja selanjutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Sibolga Tahun 2021 – 2026 ditetapkan melalui Kepala Dinas Perhubungan Kota sibolga. Renstra adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kota Sibolga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Resntar juga merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Sibolga yang ditetapkan setiap tahunnya.

2.1.1 Visi

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Mengacu kepada Perda RPJMD Kota Sibolga jelaskan bahwa visi Kota Sibolga adalah : **“MEWUJUDKAN SIBOLGA SEHAT, PINTAR DAN MAKMUR”**.

Pernyataan visi ini mengandung makna tentang adanya komitmen yang kuat untuk merealisasikan kondisi ideal yang diharapkan bisa tercapai pada periode 5 (lima) tahun yang akan datang.

2.1.2 Misi

Sedangkan dalam mewujudkan Visi Kepala Daerah tersebut, maka misi yang diemban merupakan bagian dari proses menuju cita – cita. Misi ini juga sebagai rumusan dari usaha – usaha yang diperlukan untuk mencapai visi. Dalam menjalankan misi tidak terlepas dari pengaruh kondisi lokal, regional, nasional dan global.

Usaha untuk mewujudkan Kota Sibolga Sehat, Pintar dan Makmur Tahun 2021 – 2026 dijabarkan dalam 5 (lima) Misi Pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance dengan Transparan dan Akuntabel
2. Mewujudkan dan Meningkatkan kesehatan masyarakat serta pelayanan sehinggadapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk Menata pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berwawasan kota pintar (Smart City). Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki intergritas, handal dan berdaya saing.
4. Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, memberikan subsidi penuh terhadap kebutuhan belajar 9 tahun, dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan studi ke Perguruan tinggi, serta Meningkatkan kesejahteraan guru.
5. Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang Ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dengan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga.

Dalam Hal mewujudkan Visi dan Misi Kota Sibolga tersebut, Dinas Perhubungan Kota Sibolga ikut serta dalam mensukseskan misi poin 1 (satu) yaitu : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance dengan Transparan dan Akuntabel dan visi ke 3 (tiga) yaitu : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk Menata pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berwawasan kota pintar (Smart City). Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki intergritas, handal dan berdaya saing.

Tabel. 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada tahun ke				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Mewujudkan Sistem Transportasi yang Terintegritas dan Berkelanjutan	Meningkatnya sarana prasarana dan fasilitas perhubungan untuk pengendalian keselamatan lalu lintas berjalan	Jumlah arus penumpang angkutan umum (Masuk)	678.345	712.262	747.875	785.269	824.533
			Jumlah arus penumpang angkutan umum (Keluar)	933.510	980.186	1.029.195	1.080.655	1.134.687
			Rasio Ijin Trayek	0,066	0,071	0,075	0,080	0,085
			Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	0	0	0	0	0
			Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Bis	1	1	1	1	1
			Persentase Layanan Angkutan Darat	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077

			Persentase kepemilikan KIR Angkuan Umum	0	0	0	0	0
			Pemasangan Rambu-rambu	71,05	76,94	82,82	88,70	94,58
			Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
			Jumlah orang/ barang yang Terangkut Angkutan Umum	1.611.855	1.692.448	1.777.070	1.865.924	1.959.220
			Jumlah orang, Barang melalui Dermaga / Bandara/ Terminal Per Tahun	12,083	33.000	36.300	43.923	43.923

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan untuk Pengendalian Keselamatan Lalu Lintas Jalan	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Keluar/ Masuk)	org	Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/ keluar daerah selama 1 tahun	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
		Rasio Izin Trayek	%	$\frac{\text{Jumlah Izin Trayek yang Dikeluarkan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100 \%$	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
		Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	unit	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum yang memenuhi persyaratan teknis layak jalan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
		Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Bis	unit	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bus	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
		Persentase Layanan Angkutan Darat	%	$\frac{\text{Jumlah Angkutan Darat}}{\text{Jumlah Penumpang Angkutan darat}} \times 100 \%$	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum		$\frac{\text{Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR Pada Tahun } n_x}{\text{Jumlah angkutan umum pada tahun } n} \times 100\%$	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
		Pemasangan Rambu-rambu	unit	$\frac{\text{Jumlah pemasangan rambu - rambu lalu lintas pada tahun } n}{\text{Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$	Bidang Prasarana dan Keselamatan
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	unit	$\frac{\text{Panjang Jalan}}{\text{Jumlah Kendaraan}} \times 100\%$	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
		Jumlah orang/ Barang yang terangkut angkutan umum	orang	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
		Jumlah orang/ barang melalui dermaga/ bandara/terminal per tahun	Org/ Brg	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/ bandara/terminal per tahun	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

2.2 Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana kerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Resntra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana kerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Perhubungan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Mewujudkan Sistem Trasportasi yang Terintegritas dan Berkelanjutan	Meningkatnya sarana prasarana dan fasilitas perhubungan untuk pengendalian keselamatan lalu lintas berjalan	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Masuk)	Orang	785.269
			Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Keluar)	Orang	1.080.655
			Rasio Izin Trayek	Persen	0,080
			Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Persen tase	0
			Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Bis	Persen tase	1
			Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen tase	0,077
			Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Unit	0
			Pemasangan Rambu-rambu	Buah	88,70
			Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	Persen	0,012
			Jumlah orang/ Barang yang terangkut angkutan umum	Orang	1.865.924

		Jumlah orang/ barang melalui dermaga/ bandara/terminal per tahun	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/ bandara/terminal per tahun	Orang	43.923
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang trasparan dan akuntabel	Nilai Evaluasi LAKIP OPD		A
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		86

2.3 perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Perhubungan tahun 2024

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Sarana Prasarana dan fasilitas Perhubungan untuk Pengendalian Keselamatan Lalu Lintas Jalan	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Masuk)	785.269 Org
		Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Keluar)	1.080.655 Org
		Rasio Izin Trayek .	0.08%
		Persentase Pelabuhan Laut/ Terminal yang sesuai Standar	100 %
		Persentase Layanan Angkutan Umum	0.077 %
		Pemasangan Rambu - Rambu	88.70%
		Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	0.012%
		Jumlah orang / Barang yang terangkut angkutan umum	1.865.924 Org
		Jumlah orang / Barang melalui dermaga/ bandara terminal pertahun	43.923 org
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan.	Nilai Evaluasi LAKIP OPD	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan pada tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) program yaitu :

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota	Rp.7.742.054.642,-
2. Program Penyelenggaraan (LLAJ)	Rp.1.237.709.100,-
3. Program Pengelolaan Pelayaran	<u>Rp. 176.818.800,-</u>
	Rp.9.156.582.542

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah diterapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2024.

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	Poin
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	80	Nilai
1.	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase Laporan tertib pelaporan capaian kinerja, rencana kerja dan penganggaran	100	Persen
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi dan Pelaporan keuangan	100	Persen
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	35	orang/ bulan
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Persentase tingkat Disiplin Aparatur	100	Persen
-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapannya.	1	Paket
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan	100	Persen
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan kantor.	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	Paket
-	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket

-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	12	Paket
-	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket
-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Paket
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan.	32	Dokumen
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	60	Laporan
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Pesentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelayanan perhubungan.	100	Persen
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	unit
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa Penunjang Layanan Kedinasan		
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	816	Laporan
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	120	Orang
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah dalam Menunjang Pelayanan Perhubungan.	100	Persen

-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya.	25	Unit
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	137	Unit
-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah sarana dan Prsarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	tahun
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Cakupan Pelayanan Transportasi Yang Layak	100	Persen
1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/ Kota	100	Persen
-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	1	Kegiatan
-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1	kegiatan
2.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Capaian Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		
-	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal (yang di evaluasi (fasilitas utama dan penunjang)	1	Kegiatan
3.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten/ Kota	100	Persen
-	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan kabupaten/ Kota	1	Kegiatan
4	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) daerah	100	Persen

		Kabupaten/ Kota		
-	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan umum untuk jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) kabupaten/ Kota	1	Kegiatan
5.	Penetapan tarif kelas ekonomi untuk Angkutan orang yang melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100	Persen
-	Pengendalian dan Pengawasan tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2	Kegiatan
III	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Cakupan Pengelola Pelayaran	100	Persen
1.	Pembangunan dan Penertiban izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Persentase Capaian Pembangunan dan Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	100	Persen
-	Pengawasan Pengoperasian pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	12	laporan

BAB III

AKAUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Dinas Perhubungan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas perhubungan Kota Sibolga yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja di gunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja Dinas Perhubungan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk kriteria penilaian dalam Realisasi Kinerja organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Interval Nilai dan Kriteria Pemilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Pada sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisa program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja,

3.1.1 Membandingkan Antar Target Dan Realisasi Tahun Pelaporan

Hasil pengukuran atas perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut.

Tabel 3.2
Membandingkan Antar Target Dan Realisasi Tahun Pelaporan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan untuk Pengendalian Keselamatan	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (masuk)	785.269	730.554	93.03	Sangat Tinggi	
		Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (keluar)	1.080.655	825.321	76.37	Tinggi	Dishub
		Persentase Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bus	1	1	100	Sangat Tinggi	Dishub
		Persentase Layanan Angkutan Darat	0,077	0.086	1.12	Sangat Rendah	Dishub
		Pemasangan Rambu-Rambu	88.70	1.43	0.16	Sangat Rendah	Dishub
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0,012	0.028	2.33	Sangat Rendah	Dishub
		Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum	1.865.924	1.555.875	83.38	Tinggi	Dishub

		Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Bandara Terminal per Tahun	39.930	70.530	176.63	Sangat Tinggi	Dishub
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi LAKIP OPD	86	85,01	98.84	Sangat Tinggi	Hasil Evaluasi LAKIP Dishub 2023
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	82	96.47	Sangat Tinggi	
					72.83	Sedang	

Uraian Penjelasan tabel :

Berdasarkan hasil pengukuran atas capaian Perjanjian Kinerja pada tabel diatas secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Sibolga adalah 2 sasaran dengan kategori sedang (72.83%).

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya atau tahun 2022 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Membandingkan antara realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		% Capaian
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan untuk Pengendalian Keselamatan	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (masuk)	656.875	731.556	785.269	730.554	93.03

		Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (keluar)	751.118	824.000	1.080.655	825.321	76.37
		Rasio Izin Trayek	0,014	0,004	0.080	0	0
		Jumlaj Uji KIR Angkutan Umum	0	0	0	0	0
		Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bus	1	1	1	1	100
		Persenatse Layanan Angkutan Darat	0,012	0,017	0.077	0.086	1.11
		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	0	0	0	0	0
		Pemasangan Rambu-Rambu	0	4.16	88.70	1.43	0.16
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0,029	0.09	0.012	0.028	2.33
7		Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum	1.408.063	1.515.432	1.865.924	1.555.875	83.38
		Jumlah Orang/ Barang melalui Dermaga/ Bandara Terminal per Tahun	81.219.	82.088	39.930	70.530	176.6

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari semua indikator ada beberapa indikator yang realisasinya 0 (nol) dan menurun. Indikator yang realisasinya nol itu seperti :

- Rasio Izin Trayek Realisasi Tahun 2023 0 (nol), sebagai penyebabnya adalah pada tahun bersangkutan tidak ada pelaku usaha yang mengurus izin trayek.
- Jumlah Uji KIR Angkutan Umum dan Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Realisasi tahun 2023 0 (nol), sebagai penyebabnya adalah Karena Pemerintah Kota Sibolga belum memiliki gedung PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor)

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Perhubungan periode 2021 – 2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan strategi Organisasi.

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024	Target Akhir Rencana strategis	Tingkat Kemajuan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=4/5x100</i>
1.a	Meningkatnya Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan untuk Pengendalian Keselamatan	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (masuk)	730.554	865.789	84.38
1.b		Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (keluar)	825.321	1.194.422	69.09

2.		Rasio Izin Trayek	0	0,089	0
3.		Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	0	0	0
4.		Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bus	1	1	100
5.		Persenatse Layanan Angkutan Darat	0.086	0,077	1.12
6.		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	0	0	0
7.		Pemasangan Rambu-Rambu	1.43	100,4	1.42
8.		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0.028	0,012	2.33
9.		Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum	1.555.875	2.057.181	75.63
10.		Jumlah Orang/ Barang melalui Dermaga/ Bandara Terminal per Tahun	70.530	48.315	145.98

Berdasarkan tabel diatas realisasi capaian indikator tahun 2024 terhadap target akhir Renstra tahun 2024 adalah 43.63%, sehingga belum melebihi target dengan kategori “sangat rendah”.

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional (Jika Ada) .

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi Nama Daerah Lain	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.a	Meningkatnya Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan untuk Pengendalian Keselamatan	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (masuk)	730.554	Tidak ada	Tidak ada
1.b		Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (keluar)	825.321		
2.		Rasio Izin Trayek	0		
3.		Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	0		
4.		Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bus	1		
5.		Persenatse Layanan Angkutan Darat	0,086		
6.		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	0		
7.		Pemasangan Rambu- Rambu	1.43		
8.		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0,028		
9.		Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum	1.515.875		
10.		Jumlah Orang/ Barang melalui			

	Dermaga/ Bandara Terminal per Tahun	70.530		
--	-------------------------------------	--------	--	--

Dari tabel terlihat bahwa, analisis capaian kinerja masing – masing indikator dengan perbandingan realisasi kinerja dengan Standar Nasional yaitu tidak ada.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut

Tabel 3.6
Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Di Lakukan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan untuk Pengendalian Keselamatan	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (masuk)	785.269	730.554	93.03	Masih layaknya armada mobil penumpang yang beroperasi	Adanya pelayanan prima yang diberikat pihak angkutan kepada calon penumpang
		Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (keluar)	1.080.655	825.321	76.37	Masih layaknya armada mobil penumpang yang beroperasi	Adanya pelayanan prima yang diberikat pihak angkutan kepada calon penumpang .
		Rasio Izin Trayek	0,075	0	0	Kurangnya kesadaran pelaku pengusaha angkutan untuk mengurus izin trayaknya	Diberikan himbauan kepada pengusaha angkutan untuk mengurus izin trayek yg sdh mati masanya
		Jumlah Uji KIR Angkutan	0	0	0	Belum adanya Gedung PKB	Untuk menamban penarikan

		Umum				(Pengujian Kenderaan Bermotor) di Kota Sibolga	PAD diusulkan agar Pemerintah Kota Sibolga mempunyai gedung PKB
		Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bus	1	1	100	masih layaknya pelabuhan ASP sebagai dermaga penyeberangan	Monitoring ataupun pemeliharaan terhadap dermaga dilakukan
		Persentase Layanan Angkutan Darat	0,077	0,086	1.11	Masih layaknya armada mobil penumpang yang beroperasi	Adanya pelayanan prima yang diberikat pihak angkutan kepada calon penumpang
		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	0	0	0	Belum adanya Gedung PKB (Pengujian Kenderaan Bermotor) di Kota Sibolga	Untuk menamban penarikan PAD diusulkan agar Pemerintah Kota Sibolga mempunyai gedung PKB
		Pemasangan Rambu-Rambu	88.70	1.43	0.16	Banyaknya rambu – rambu yang sdh tidak layak pakai	Pengadaan rambu – rambu lalu lintas
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kenderaan	0,012	0.028	2.33	Banyaknya peminat pelaku untuk memilik kenderaan	
7		Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum	1.865.924	1.555.875	83.38	Masih layaknya armada mobil penumpang yang beroperasi	Adanya pelayanan prima yang diberikat pihak angkutan kepada calon penumpang
		Jumlah Orang/ Barang melalui Dermaga/	39.930	70.530	176.63	masih layaknya pelabuhan ASP sebagai dermaga	Pelayanan prima yang diberikan kepada calon

		Bandara Terminal per Tahun				penyeberangan	penumpang .
--	--	----------------------------	--	--	--	---------------	-------------

Analisi penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu :

Capaian yang tergolong tinggi tersebut dapat tercapai karena adanya dukungan dan kerjasama yang dilakukan dalam mencapai sasaran yang ditargetkan. Namun disisi lain, masih terdapat permasalahan yang perlu menjadi bahan perhatian, diantaranya :

1. Keterbatasan anggaran, data dan informasi
2. Belum optimalnya komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait
3. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia
4. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mepedomani indikasi kegiatan dalam RKPD maupun RPJMD untuk merencanakan kegiatan.

3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Tabel 3.7
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

No.	Indikator/sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisien
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1.	Persentase Cakupan Pelayanan Trasportasi Yang Layak	100	67.00	67.00	1.237.709.100	939.529.000	75.91	efisien
2.	Persentase Cakupan Pengelola Pelayaran	100	100	176.63	176.818.800	175.680.000	99.36	efisien

3.1.7 Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel di bawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Capaian %	Menukung/ Tidak menunjang	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Yang Baik	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Yang Baik	88.29	Menunjang	Realisasi Program (88.29%) dari Target 100%. Analisis Capaian Indikatoer Kinerja. masuk pada kategori Tinggi
				Adminstrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase Capaian Adminsitasi Keuangan Perrangkat Daerah	80.35	Menunjang	Realisasi Program Kegiatan (80.35%) dari Target 100%. Analisis Capaian Indikatoer Kinerja sebesar Rp.80.35. Indikator Kinerja masuk kategori Tinggi
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80.35	Menunjang	Realisasi Program Kegiatan (80.35%) dari Target 100%. Analisis Capaian Indikatoer Kinerja sebesar

								Rp.80.35. Indikator Kinerja masuk kategori Tinggi
				Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100	Menunjang	Realisasi Program Kegiatan (100%) dari Target 100%. Analisis Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Masuk pada kategori sangat tinggi
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	Menunjang	Realisasi Program Kegiatan (100%) dari Target 100%. Analisis Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Masuk pada kategori sangat tinggi
				Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Persentase Administrasi Umum Perangkat daerah	93.27	Menunjang	Realisasi Program/ Kegiatan (93.27%) dari target 100% Masuk Pada Kategori Sangat Tinggi
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99.97	Menunjang	Realisasi Program/ Kegiatan (99.97%) dari

					yang Disediakan			target 100% Masuk Pada Kategori Sangat Tinggi
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	98.79	Menunjang	Realisasi Program/ Kegiatan (98.79%)dari target 100% Masuk Pada Kategori Sangat Tinggi
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	99.91	Menunjang	Realisasi Program/ Kegiatan (99.91%)dari target 100% Masuk Pada Kategori Sangat Tinggi
				Penyediaan Bahan logistik kantor.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	98.43	Menunjang	Realisasi Program/ Kegiatan (98.43%)dari target 100% Masuk Pada Kategori Sangat Tinggi
				Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	99.72	Menunjang	Realisasi Program/ Kegiatan (99.72%)dari target 100% Masuk Pada Kategori Sangat Tinggi
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	78.16	Menunjang	Realisasi Program/ Kegiatan (78.16%)dari

								target 100% Masuk Pada Kategori Tinggi
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.96	Menunjang	Realisasi Program/ Kegiatan (82.96%) dari target 100% Masuk Pada Kategori Tinggi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Capaian Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	93.39	Menunjang	Realisasi Program/ Kegiatan (93.39%) dari target 100% Masuk Pada Kategori Sangat Tinggi
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	93.39	Menunjang	Realisasi Program/ Kegiatan (93.39%) dari target 100% Masuk Pada Kategori Sangat Tinggi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Capaian Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.58	Menunjang	Realisasi Program/ Kegiatan (97.58%) dari target 100% Masuk Pada Kategori Sangat Tinggi
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	99.32	Menunjang	Realisasi Program/ Kegiatan (99.32%) dari target 100%

					Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Masuk Pada Kategori Sangat Tinggi
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84.81	Menunjang	Realisasi Program/ Kegiatan (84.81%) dari target 100% Masuk Pada Kategori Tinggi
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	98.94	Menunjang	Realisasi Program/ Kegiatan (98.94%) dari target 100% Masuk Pada Kategori Sangat Tinggi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98.51	Menunjang	Realisasi Program/ Kegiatan (98.51%) dari target 100% Masuk Pada Kategori Sangat Tinggi
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	98.47	Menunjang	Realisasi Program/ Kegiatan (98.47%) dari target 100% Masuk Pada Kategori Sangat Tinggi
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98.28	Menunjang	Realisasi Program/ Kegiatan (98.24%) dari target 100% Masuk Pada

								Kategori Sangat Tinggi
				Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	Menunjang	Realisasi Program/ Kegiatan (100%) dari target 100% Masuk Pada Kategori Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan untuk Pengendalian Keselamatan		100	Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Cakupan Pelayanan Transportasi Yang Layak	79.04	Menunjang	Realisasi Program/ (79.04%) dari target 100% Masuk Pada Kategori Tinggi
				Penyediaan PerlengkapanJalanDijalan Kabupaten /Kota	Capaian Persentase Pelayanan Transportasi Yang Layak.	97.77	Menunjang	Realisasi Program/ Kegiatan (97.77%) dari target 100% Masuk Pada Kategori Sangat Tinggi
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	97.92	Menunjang	Realisasi Program/ Kegiatan (97.92%) dari target 100% Masuk Pada Kategori Sangat Tinggi
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	96.97	Menunjang	Realisasi Program/ Kegiatan (96.97%) dari target 100%

								Masuk Pada Kategori Sangat Tinggi
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Capaian Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	99.20	Menunjang	Realisasi Program/ Kegiatan (99.20%) dari target 100% Masuk Pada Kategori Sangat Tinggi
				Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang di evaluasi (Fasilitas Utama dan Pendukung)	99.20	Menunjang	Realisasi Program/ Kegiatan (99.20%) dari target 100% Masuk Pada Kategori Sangat Tinggi
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten/ Kota	64.17	Menunjang	Realisasi Program/ Kegiatan (64.17%) dari target 100% Masuk Pada Kategori Sedang
				Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan kabupaten/ Kota	64.17	Menunjang	Realisasi Program/ Kegiatan (64.17%) dari target 100% Masuk Pada Kategori Sedang
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau barang antar Kota	99.60	Menunjang	Realisasi Program/ Kegiatan (99.60%) dari target 100%

				Kabupaten/ Kota	Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			Masuk Pada Kategori Sangat Tinggi
				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota.	99.60	Menunjang	Realisasi Program/ Kegiatan (99.60%) dari target 100% Masuk Pada Kategori Sangat Tinggi
				Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	97.11	Menunjang	Realisasi Program/ Kegiatan (97.11%) dari target 100% Masuk Pada Kategori Sangat Tinggi
				Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Tarif Kelas Ekonomi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	97.11	Menunjang	Realisasi Program/ Kegiatan (97.11%) dari target 100% Masuk Pada Kategori Sangat Tinggi
				Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Cakupan Pengelola Pelayaran	99.36	Menunjang	Realisasi Program (99.36%) dari target 100% Masuk Pada Kategori Sangat Tinggi

				Pembangunan dan Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Capaian Pembangunan dan Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Bermotor yang Tersedia	99.36	Menunjang	Realisasi Program/ Kegiatan (99.36%) dari target 100% Masuk Pada Kategori Sangat Tinggi
				Pengawasan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan penyeberangan	Jumlah Sumber Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan kapasitasnya	99.36	Menunjang	Realisasi Program/ Kegiatan (99.36%) dari target 100% Masuk Pada Kategori Sangat Tinggi

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	7.742.054.642	6.835.422.024	88,29
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.298.100	3.250.0500	98.56
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.085.410.722	3.282.491.321	80.35
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	265.072.385	265.072.385	100
4.	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	451.126.652	420.786.325	93.27
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	151.852.400	141.820.000	93.39
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.341.237.620	2.284.575.683	97.58
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.237.709.100	978.260.000	79.04
1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	311.058.000	304.124.500	97.77
2.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	5.200.000	49.800.000	99.20
3.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota.	694.403.900	445.604.500	64.17
4.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	78.094.000	77.780.000	99.60
5.	Penetapan tarif Kelas Ekonomi untuk angkutan orang yang melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan	103.953.200	100.951.000	97.11

	Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
III.	Program Pengelolaan Pelayaran	197.317.100	131.040.000	66,41
1.	Pembangunan dan Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	176.818.800	175.680.000	99.36

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Sibolga pada tahun 2024, didukung dengan anggaran APBD Kota Sibolga sebesar Rp9.156.582.542,- (Sembilan milyar seratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat capaian serapan anggaran program/ kegiatan tahun 2024 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Program ini memuat beberapa kegiatan yang terdiri dari aspek perencanaan, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa, sarana dan prasarana serta kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yang nilai capaian serapan anggarannya sebesar 88,29%

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini memuat beberapa kegiatan yang mendukung tugas pokok dan Dinas Perhubungan dalam mencapai sasaran yaitu Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang aman dan memadai serta meningkatnya sarana prasarana dan fasilitas perhubungan untuk pengendalian keselamatan dengan serapan anggaran 79.04%

3. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini memuat kegiatan pengawasan pengoperasian pelabuhan, dalam mencapai sasaran yaitu meningkatnya pelayanan dan pengawasan di pelabuhan sungai dan danau dengan serapan anggaran 66,41%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perhubungan Kota Sibolga Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Dinas Perhubungan Tahun 2024. Penyusunan LkjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Sibolga dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Perhubungan tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dinas perhubungan memiliki 1 (satu) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator, dengan sasaran indikator sudah tercapai dengan kategori sangat tinggi 2 (dua), kategori tinggi ada 3 (tiga) dan kategori sangat rendah ada 5 (lima).
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan antara lain :
 - Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan.
 - Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi dalam penyelenggaraan berlalu lintas.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan kinerja yang menggambarkan seluruh kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu diperhatikan.
2. Melaksanakan aktivitas yang mendukung kinerja yang ingin dicapai.
3. Mengumpulkan data kinerja yang relevan untuk mengukur capaian kinerja.

Dengan selesainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perhubungan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Perhubungan kepada pihak – pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Sibolga, Februari 2024

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



AGUS MANDOHAR SITOMPUL, SE
Penata Tk.I
NIP. 19820810 201101 1 011